

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang baik (*good governance government*) merupakan penilaian masyarakat terhadap pemerintahan tersebut, sehingga sistem pemerintahan yang baik (*good governance government*) diharapkan selalu mengalami peningkatan, hal ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Fernanda,2016).

Salah satu bentuk transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan publik adalah pembuatan laporan keuangan. Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan keuangan publik, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi-regulasi tersebut menuntut Pemerintah membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan APBN/D.

Laporan keuangan merupakan unsur penting dalam pemerintahan karena laporan keuangan di susun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan unsur penting dalam pemerintahan karena laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: *relevan*, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila laporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, berarti pemerintah telah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan tersebut menerapkan laporan keuangan karakteristik laporan keuangan sebagai berikut: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Regulasi tersebut mengharuskan laporan keuangan disajikan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, objektif dan dapat diverifikasi.

Penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2005 pada Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses perkembangan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi termasuk adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) penggunaan informasi canggih teknologi sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson dkk, 2015).

Informasi yang tepat waktu merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatan waktu) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Di masa sekarang apalagi saat ini, tugas-tugas atau pekerjaan manusia dalam organisasi banyak yang telah digantikan oleh komputer termasuk dalam bidang akuntansi. Proses pengolahan data akuntansi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini karena kemampuan komputer dalam mengolah data yang jauh melebihi kecepatan manusia (Jugiyanto, 1995:41).

Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat memudahkan berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP No.11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik karena masih sedikit situs *web* pemerintah daerah yang *update* mengenai informasi keuangannya.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah adalah peran audit internal. Peran audit internal berkaitan langsung dengan kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersirat dalam pasal 9 (1) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas atau kehandalan Sistem Pengendalian *Intern*. Terdapat lima jenis opini yang diberikan BPK yaitu : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (*disclaimer of opinion*).

Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas, karena opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini yang diberikan atas suatu LKPD merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Adanya perubahan peningkatan opini laporan keuangan suatu pemerintah daerah, misalnya dari WDP ke WTP secara umum telah menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintahan daerah tersebut dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD seluruh Indonesia menunjukkan masih banyak pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk tahun pelaporan 2015, BPK mencatat hanya 58% atau 312 LKPD yang memperoleh opini WTP. Sementara itu LKPD lainnya tercatat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 187 LKPD, Tidak Menyatakan

Pendapat (TMP) sebanyak 30 LKPD, dan masih ada 4 LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW). Namun secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah semakin baik setiap tahun, hal ini ditandai dengan terus meningkatnya persentase opini WTP, penurunan WDP dan TMP. Dibandingkan dengan tahun 2014, LKPD yang mendapat opini WTP mengalami kenaikan dari 47% menjadi 58%. Kenaikan kualitas ini didukung oleh upaya pemerintah daerah memperbaiki kelemahan yang terjadi sepanjang tahun 2014.

Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam era reformasi sektor publik saat ini adalah menguatnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palopo Tahun Anggaran (TA) 2019 diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel. Meskipun sudah beberapa kali mengantongi opini WTP, namun ada dua catatan untuk meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Pada penelitian sebelumnya, bahasan studi tentang kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan. Namun terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2016) peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, dan penelitian Pangestu (2019) teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, bertolak belakang dengan penelitian Nazaruddin dan Syahrial (2018) peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah, dan penelitian Chodijah (2018) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tentang pentingnya teknologi informasi dan peran audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta fenomena yang terjadi saat ini dan adanya *research gappada* penelitian sebelumnya

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai "PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang dari penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1.1.1 Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo?
- 1.2.2 Apakah peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- 1.3.2 Untuk mengetahui peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan bukti empiris bahwa pengaruh teknologi informasi dan peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
 - b. Dapat menambah pengetahuan mengenai kualitas laporan keuangan dan faktor yang mempengaruhinya seperti teknologi informasi dan peran audit internal.

1.4.2 Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Penelitian disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis sendiri tentang kualitas laporan keuangan dan faktor mempengaruhinya yaitu teknologi informasi dan peran audit internal.

b. Bagi Instansi Pemerintahan yang bersangkutan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi pada instansi pemerintahan untuk dapat meningkatkan teknologi informasi dan peran audit internal sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Kegunaan-keputusan (*Decision-usefulness Theory*)

Teori kegunaan keputusan (*decision usefulness theory*) dikemukakan pertama kali pada tahun 1954 dalam disertasi dengan judul *An Accounting Concept of Revenue* di *University of Chicago* Amerika Serikat oleh George J. Staubus. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama *A Theory of Accounting to Investors* (Staubus, 2000).

Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Teori kegunaan keputusan memberikan pemahaman bahwa informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh penyaji informasi akuntansi agar cakupan informasi dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Premis dari teori kegunaan-keputusan yaitu: 1) Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi finansial mengenai perusahaan guna pengambilan keputusan; 2) Tujuan akuntansi dikaitkan dengan investor adalah menyediakan informasi finansial mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan investasi; 3) Investor mencakup pengertian pemilik dan kreditor. Penelitian ini mengkaji kompetensi aparatur, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, internal audit dan kualitas laporan keuangan daerah.

2.1.2 Teori *Stakeholder*

Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder* (Menurut Ghazali dan Chariri, 2007:409).

Meskipun *stakeholder theory* mampu memperluas perspektif pengelolaan perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*, teori ini memiliki kelemahan. Gray *et al* (1997) mengatakan bahwa kelemahan dari *stakeholder theory* terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan dalam mengatur *stakeholder*-nya. Perusahaan hanya diarahkan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang dianggap penting dan berpengaruh dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada *stakeholder* yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa *stakeholder theory* mengabaikan pengaruh masyarakat luas (*society as a whole*) terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan (Ghozali dan Chariri, 2007:411).

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan

para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada *principal* atas pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semakin menguatnya tuntutan terhadap lembaga-lembaga publik untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik, mengharuskan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Oleh sebab itu, mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dan daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan beberapa peraturan pemerintah (PP) menyangkut pengelolaan keuangan daerah diantaranya, PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam PP No.71 tahun 2010 tentang SAP.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam SAP terdapat empat persyaratan karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: Relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah ddipahami. Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP sangat menentukankualitas LKPD.

2.1.4 Teknologi Informasi

Teknologi informasi termasuk komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*) dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Wilkinson dkk. 2000). Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi keuangan, tidak ada kegiatan umumnya yang ditingkatkan atau dikurangkan. Sistem informasi akuntansi tetap mengumpulkan, memproses dan menyimpan data dan setiap proses akuntansi ini dapat mengurangi penggunaan kertas. Sistem informasi juga mengontrol keakuratan. dan hal terpenting segala tahapan proses akuntansi dapat dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Jurnal dkk (2002) bahwa, pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi.

Berdasarkan uraian tersebut penerapan teknologi informasi yang mendukung dan memberi manfaat positif terhadap segala aktivitas dalam organisasi, adapun indikator yang digunakan untuk mengukur manfaat penggunaan teknologi informasi menurut Sutarman (2012) yaitu: 1) Kecepatan (*Speed*); 2) Konsistensi (*Consistency*); 3) Ketepatan (*Precision*); dan 4) Keandalan (*Realibility*). Untuk menunjang proses pengelolaan keuangan pemerintah, setiap kementerian dan lembaga perlu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan instansinya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan dalam penyusunan laporan keuangan.

Penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2005 pada Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses perkembangan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib

mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pemanfaatan teknologi informasi yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen, jurnal, buku besar hingga menjadi suatu laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi laporan keuangan (Salehi & Torabi, 2012). Hal ini pun senada dengan penelitian Sari & Witono (2014) bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap positif kualitas laporan keuangan. Hal tersebut bermakna bahwa bagaimana penerapan teknologi informasi yang mendukung tujuan efisiensi dan responsif dan tidak menjadi sia-sia jika dimanfaatkan secara optimal. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi organisasi, seperti mampu meringankan kegiatan yang kompleks dan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dipahami, dan diuji dalam konteks perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen.

Penggunaan teknologi informasi termasuk adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) penggunaan informasi canggih teknologi sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson dkk. 2000). Oleh sebab itu Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit.

2.1.5 Peran Audit Internal

Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi. Audit Internal merupakan suatu fungsi yang ada di dalam suatu organisasi yang berperan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas atau program di dalam organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisnya kegiatan/aktivitas/program.

BPKAD adalah aparat pemeriksa intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota. BPKAD melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan di dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tersebut. Pemeriksaan intern yang dilakukan yaitu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) (PP No. 60 tahun 2008).

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan

Untuk memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008: 145). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut: “Karakteristik kualitatif laporan

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, (d) dapat dipahami ”.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan adalah dengan mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Sebelum penelitian ini dilakukan, sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang pengaruh teknologi informasi dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Isi	Metodologi	Tahun
1	Akhmad Syarifuddin	Penelitian ini berhasil memperoleh bukti empiris bahwa Variabel Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD tetapi kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap SPIP, sedangkan SPIP berpengaruh signifikan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	2014

		terhadap Kualitas LKPD. Kemudian hasil pengujian juga menunjukkan bahwa SPIP signifikan dalam memediasi pengaruh kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD tetapi tidak signifikan dalam memediasi pengaruh peran Audit Intern terhadap Kualitas LKPD.		
2	Nazaruddin dan Syahrial	Audit internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Pengolahan data dilakukan dengan bantuan model persamaan linear berganda program SPSS	2017
3	Dandy Evan Kiswara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, motivasi, pengalaman kerja, obyektifitas, integritas, etika auditor, profesionalisme, dan akuntabilitas adalah faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan kualitas audit pada APIP.	Penelitian ini memuat analisis koefisien korelasi Pearson dan hitungan dari koefisien korelasi dengan rumus yang dikembangkan oleh Hunter dan Schmidt (1990).	2018
4	Lola Septiana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM	Penelitian ini menggunakan metode	2017

		berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD, dan peran audit internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD.	kuantitatif, Pengolahan data dilakukan dengan bantuan model persamaan linear berganda program SPSS	
5	Hardyansyah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Pengolahan data dilakukan dengan bantuan model persamaan linear berganda program SPSS	2016
6	Lasmara dan Rahayu	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Pengolahan data dilakukan dengan bantuan model persamaan linear berganda program SPSS	2016
7	Emay, Catur dan Adi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial audit internal dan kompetensi staf akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Metode yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif dan tipe penelitian deskriptif verifikatif	2019
8	Melati Ramadhani, Ayu	Hasil penelitian menunjukkan	Metode statistik yang	2018

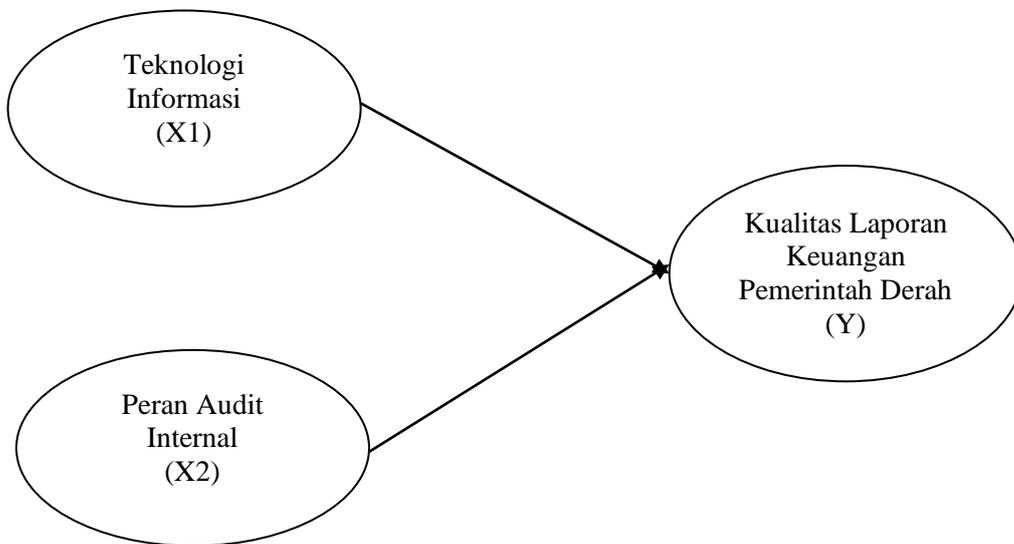
	Noorida Soerono, Windu Mulyasari	bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman atas sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda.	
9	Lusi Novita Sari	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaruh yang signifikan positif antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD Kabupaten Kerinci, dan Pengaruh yang signifikan positif antara peran auditor internal pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD Kabupaten Kerinci.	Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows.	2017
10	Annisa Fitria	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Pengolahan data dilakukan dengan bantuan model persamaan linear berganda program	2018

		sedangkan untuk kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern dan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	SPSS	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Skema Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 : Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2 : Peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian pada kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah di Kota Palopo. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih ± 2 (dua) bulan dengan melakukan penyebaran kuisisioner.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer data yang sumbernya di peroleh dari kuisisioner yang disebarkan kepada para Anggota/Pegawai yang bekerja pada kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah area umum, termasuk: obyek/subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel dari penelitian ini adalah Anggota/Pegawai Kantor Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo Sebanyak ± 75 orang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuisioner (*Questionnaire*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan terkait dengan objek yang akan diteliti, kepada pihak yang berwenang dalam Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median modus standar devisiasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Menurut Ghozali dan latan, 2014).

3.5.2 Uji Validitas

Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menghitung kerelasi antara skor item masing-masing pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*). Pengujian validitas memiliki kriteria jika nilai sig. (*2- tailed*) pada total skor konstruk $< 0,05$ atau jika nilai *r* hitung lebih besar dari *r* table (pada taraf signifikan $0,05$). Maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan “ valid “, dan sebaliknya (Menurut Sugiyono, 2012).

3.5.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuisisioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliabel atau tidak. Kuisisioner dikatakan reliabel jika kuisisioner tersebut dilakukan pengukuran ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama (Menurut Sugyono, 2012).

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan linier yang terdiri dari dua variabel bebas. (Menurut Sapar, 2017) rumus regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = KLKPD

α = Konstan

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi

X1 = Teknologi Informasi

X2 = Peran Audit Internal

e = Standar *error*

3.6.2 Uji Koefisien Determenasi (R^2)

Uji koefisien determenasi dirancang untuk mengukur kemampuan model untuk menjelaskan perubahan variabel dependen (Ghozali, 2016). Bila koefisien determenasi $R^2 = 0$, itu berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh sama sekali terhadap variabel dependen ($= 0$ persen). Sebaliknya, jika koefisien determenasi $R^2 = 1$, itu berarti bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen 100 persen. Lerak R^2 berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan $0 < R^2 \leq 1$. Besarnya koefisien determenasi variabel dependen dapat diketahui dari skortabel koefisien secara parsial variabel independen terhadap atau kuadrad parsial *correlation* dari koefisien determenasi secara simultan diperoleh dari besarnya R^2 atau adjusted R square. Nilai adjusted R square yang kecil berarti kemampuan variabel –variabel bebas dalam menjalankan variabel terikat amat terbatas.

3.6.3 Secara Simultan (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah varibel bebas (Variabel X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Varibel Y). Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku umum populasi. Untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{table} .

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikan sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $<$ dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan sebaliknya.
- b. Jika nilai signifikan $>$ dari probabilitas 0,05 mengandung artu bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

3.6.4 Secara Simultan (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji F dengan tariff signifikan 0,05 atau 5 persen. Jika nilai signifikan uji F lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Dan jika nilai signifikansi uji F lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7 Definisi Operasional

Tabel 3.7 Definisi Operasional

No.	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Dimensi	Skala
1.	Teknologi Informasi (X1). (Teknologi informasi termasuk komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet) dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Ketika komputer dan komponen-komponen yang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecepatan (<i>Speed</i>). 2. Konsistensi (<i>Consistency</i>). 3. Ketepatan (<i>Precision</i>). 4. Keandalan (<i>Realibility</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akurasi (<i>Accuracy</i>). 2. Ketepatan Waktu (<i>Timeliness</i>). 3. Relevansi (<i>Relevancy</i>). 4. Kelengkapan (<i>Completeness</i>). 	Ordinal

	<p>berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan kedalam sistem akuntansi keuangan, tidak ada kegiatan umumnya yang ditingkatkan atau dikurangkan.)</p> <p>Sumber : (Wilkinson dkk.2000).</p>				
2.	<p>Peran Audit Internal (X2). (Peran audit intern berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat</p>	<p>a. Misi Auditor Internal . b. Tujuan Audit Internal . c. Tugas dan Teknik Auditor Internal .</p>	<p>1. Integritas. 2. Obyektivitas. 3. Kerahasiaan. 4. Kompetensi.</p>		Ordinal

	<p>Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)).</p> <p>Sumber : (Pasal 9 (1) UU No. 15 Tahun 2004)</p>				
3.	<p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). (Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan)</p> <p>Sumber: (Rika dan Ismiatika. 2016)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat Waktu. 2. Lengkap. 3. Memiliki manfaat umpan balik . 4. Memiliki manfaat prediktif. 5. Penyajian yang jujur. 6. Dapat divirifikasi. 7. Nertalitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan. 2. Andal. 3. Dapat Dibandingkan. 	Interval

Sumber (Data Diolah 2020)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo

Pada awal dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berubah Menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

4.1.2 Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Desentralisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

4.1.3 Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo

Fungsi BPKAD Kota Palopo sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
2. Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum lintas SKPD/Instansi/unit kerja dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Perumusan dan Pembinaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemungutan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Penelaah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan UPTD.

4.1.4 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

1. Visi

“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga, dan Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya, dan Lingkungan yang Terkemuka di Indonesia”

2. Misi

Misi Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparat pelaksana pengelola keuangan dan ast daerah;
- b. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;

- c. Meningkatkan profesionalisme pelayan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

4.2 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor BPKAD Kota Palopo. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuisioner pada Kantor BPKD Kota Palopo Sebanyak 100 sampel dan diberikan kepada pegawai kantor BPKAD Kota Palopo yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah Kuisioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 75 sampel atau tingkat pengembalian kuisioner sebanyak 75 persen. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Pengumpulan Data Primer Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuisioner	Presentase
1	Distribusi Kuisioner	100	100
2	Kuisioner Kembali	75	75
3	Kuisioner cacat/tidak Kembali	25	25
4	Kuisioner yang dapat diolah	75	100
n sampel yang kembali = 75 Responden $rate = \frac{75 \times 100}{100}$ persen $= 75$ persen			

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas maka dapat dijelaskan bahwa presentase jumlah responden sebanyak 75 pegawai yang bekerhak di Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo berhasil dikumpulkan sebagai responden dalam penelitian ini. Demografi responden dapat diklasifikasi dalam tabel sebagai berikut:

- a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Analisis terhadap data jenis kelamin responden perlu untuk dilakukan karena adanya perbedaan antara pria dan wanita yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Berikut hasil analisisnya.

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-Laki	45	65
2	Perempuan	30	35
3	Jumlah	75	100

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa presentase responden dalam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin Laki-laki yaitu 45 orang atau dalam bentuk presentasi 65 persen, sementara responden Perempuan berjumlah 30 orang atau dalam bentuk presentase 35 persen. Hal ini bisa dijadikan gambaran bahwa Pegawai Kantor BPKAD Kota Palopo didominasi oleh pegawai Laki-laki.

b. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Analisis mengenai tingkat pendidikan penting untuk dianalisa karena setiap saat jenis pekerjaan membebaskan tuntutan berbeda terhadap seseorang dan bahwa setiap orang harus memiliki kemampuan sesuai dengan tujuan pekerjaan tersebut. Berikut analisisnya.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase
1	SMA/SMK/ALIYAH	15	20
2	D3	30	40
3	S1	20	26,6
4	S2	10	13,4
Total		75	100

Sumber : Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas , dapat dilihat presentase responden dalam penelitian pada kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah ini didominasi oleh tingkat pendidikan D3 sebanyak 30 orang atau 40n persen, S1 sebanyak 20 orang atau 26,6 persen, S2 sebanyak 10 orang atau 13,4 persen, dan SMA/SMK/ALIYAH sebanyak 15 orang atau 20 persen.

c. Karakteristik responden berdasarkan usia

Analisis terhadap data usia responden di Kota Palopo perlu dilakukan karena adanya *issue* penting mengenai hubungan antara umur dengan kinerja yang berkaitan dengan kualitas positif yang dibawa kedalam pekerjaan, pengalaman, pertimbangan, etika kerja yang kuat, komitmen terhadap mutu, dan tingkat pengunduran diri yang rendah. Berikut hasil analisisnya

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah (Orang)	Presentase
1	Dibawah usia 25 tahun	7	9,4
2	25 – 40 tahun	50	66,6
3	45 - 55	18	24
Total		75	100

Sumber: Data Primer yang diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.4 data di atas menjelaskan bahwa pegawai yang dijadikan responden pada kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah. Didominasi oleh yang berusia 25 – 40 tahun sebanyak 50 orang atau 66,6 persen, dibawah 25 tahun sebanyak 7 orang atau 9,4 persen dan 45 – 55 tahun sebanyak 18 orang atau 24 persen.

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiono , 2012:12). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata – rata (*mean*), standar devisi nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan Spss versi 23 sebagai berikut.

Tabel 4.5
Uji Statistik Deskriptif Teknologi Informasi

X1.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	8	10.7	10.7	10.7
	N	4	5.3	5.3	16.0
	S	54	72.0	72.0	88.0
	SS	9	12.0	12.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi Informasi yang menjawab “ Tidak Setuju” 8 orang atau 10,7 persen yang menjawab “ Tidak Setuju”, 4 orang atau 5,3 persen yang menjawab “ Netral”, 54 orang atau 72 persen yang menjawab “ Setuju”, 9 orang atau 12 persen yang menjawab “Sangat Setuju”, maka *mean* dari jawaban responden adalah 3,85 atau rata – rata setuju.

Tabel 4.6
Uji Statistik Deskriptif Teknologi Informasi

X1.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	13	17.3	17.3	17.3
	S	27	36.0	36.0	53.3
	SS	35	46.7	46.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi Informasi yang menjawab “Netral” 13 orang atau 17,3 persen yang menjawab “Netral”, 27 orang atau 36 persen yang menjawab “Setuju”, 35 orang atau 46,7 persen yang menjawab “Sangat Setuju”, maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,29 atau rata – rata sangat setuju.

Tabel 4.7
Uji Statistik Deskriptif Teknologi Informasi

X1.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	8	10.7	10.7	10.7
	S	27	36.0	36.0	46.7
	SS	40	53.3	53.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi Informasi yang menjawab “Netral” 8 orang atau 10,7 persen yang menjawab “Netral”, 27 orang atau 36 persen yang menjawab “Setuju”, 40 orang atau 53,3 persen yang menjawab “Sangat Setuju”, maka *mean* dari jawaban responden adalah 4.43 atau rata-rata sangat setuju.

Tabel 4.8
Uji Statistik Deskriptif Teknologi Informasi

X1.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	5.3	5.3	5.3
	N	2	2.7	2.7	8.0
	S	46	61.3	61.3	69.3
	SS	23	30.7	30.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi Informasi yang menjawab “Tidak Setuju” 4 orang atau 5,3 persen yang menjawab “ Tidak Setuju”, 2 orang atau 2,7 persen yang menjawab “ Netral”, 46 orang atau 61,3 persen yang menjawab “Setuju”, 23 orang atau 30,7 persen yang menjawab "Sangat Setuju", maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,17 atau rata – rata setuju.

Tabel 4.9
Uji Statistik Deskriptif Teknologi Informasi

X1.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	2.7	2.7	2.7
	S	24	32.0	32.0	34.7
	SS	49	65.3	65.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi Informasi yang menjawab “Netral” 2 orang atau 2,7 persen yang menjawab “

Netral”, 24 orang atau 32.0 persen yang menjawab “ Setuju”, 49 orang atau 65,3 persen yang menjawab “Sangat Setuju”, maka *mean* dari jawaban responden adalah 4.63 atau rata – rata sangat setuju.

Tabel 4.10
Uji Statistik Deskriptif Teknologi Informasi

X1.6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	4.0	4.0	4.0
	S	32	42.7	42.7	46.7
	SS	40	53.3	53.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi Informasi yang menjawab “Netral” 3 orang atau 4,0 persen yang menjawab “ Netral”, 32 orang atau 42.7 persen yang menjawab “ Setuju”, 40 orang atau 53,3 persen yang menjawab “Sangat Setuju”, maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,49 atau rata-rata sangat setuju.

Tabel 4.11
Uji Statistik Deskriptif Peran Audit Internal

X2.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	8	10.7	10.7	10.7
	N	4	5.3	5.3	16.0
	S	48	64.0	64.0	80.0
	SS	15	20.0	20.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Audit Internal yang menjawab “Tidak Setuju” 8 orang atau 10,7 persen yang menjawab “ Tidak Setuju”, 4 orang atau 5,3 persen yang menjawab “ Netral”, 48 orang atau 64,0 persen yang menjawab “ Setuju”, 15 orang atau 20,0 persen yang menjawab “Sangat Setuju” maka *mean* dari jawaban responden adalah 3,93 atau rata-rata setuju.

Tabel 4.12
Uji Statistik Deskriptif Peran Audit Internal

X2.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	12	16.0	16.0	16.0
	S	35	46.7	46.7	62.7
	SS	28	37.3	37.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Audit Internal yang menjawab “Netral” 12 orang atau 16,0 persen yang menjawab “ Netral”, 35 orang atau 46,7 persen yang menjawab “ Setuju”, 28 orang atau 37,3 persen yang menjawab “Sangat Setuju” maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,21 atau rata-rata setuju.

Tabel 4.13
Uji Statistik Deskriptif Peran Audit Internal

X2.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	8.0	8.0	8.0
	S	31	41.3	41.3	49.3
	SS	38	50.7	50.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Audit Internal yang menjawab “Netral” 6 orang atau 8,0 persen yang menjawab “Netral”, 31 orang atau 41,3 persen yang menjawab “Setuju”, 38 orang atau 50,7persen yang menjawab “Sangat Setuju” maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,43 atau rata-rata sangat setuju.

Tabel 4.14
Uji Statistik Deskriptif Peran Audit Internal

X2.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	5.3	5.3	5.3
	N	3	4.0	4.0	9.3
	S	46	61.3	61.3	70.7
	SS	22	29.3	29.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Audit Internal yang menjawab “Tidak Setuju” 4 orang atau 5,3 persen yang menjawab

“ Tidak Setuju”, 3 orang atau 4,0 persen yang menjawab “ Netral”, 46 orang atau 61,3 persen yang menjawab “ Setuju”, 22 orang atau 29,3 persen yang menjawab “Sangat Setuju” maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,15 atau rata-rata setuju.

Tabel 4.15
Uji Statistik Deskriptif Peran Audit Internal

X2.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	1.3	1.3	1.3
	S	29	38.7	38.7	40.0
	SS	45	60.0	60.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Audit Internal yang menjawab “Netral” 1 orang atau 1,3 persen yang menjawab “ Netral”, 29 orang atau 38,7 persen yang menjawab “ Setuju”, 45 orang atau 60,0 persen yang menjawab “Sangat Setuju” maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,59 atau rata-rata sangat setuju.

Tabel 4.16**Uji Statistik Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Y1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	8.0	8.0	8.0
	S	37	49.3	49.3	57.3
	SS	32	42.7	42.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjawab “Netral” 6 orang atau 8,0 persen yang menjawab “ Netral”, 37 orang atau 49,3 persen yang menjawab “ Setuju”, 32 orang atau 42,7 persen yang menjawab “Sangat Setuju” maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,65 atau rata-rata sangat setuju.

Tabel 4.17**Uji Statistik Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Y2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	4.0	4.0	4.0
	N	20	26.7	26.7	30.7
	S	33	44.0	44.0	74.7
	SS	19	25.3	25.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjawab “Tidak Setuju” 3 orang atau 4,0 persen yang menjawab “ Tidak Setuju”, 20 orang atau 26,7 persen yang menjawab “ Netral”, 33 orang atau 42,7 persen yang menjawab “Setuju”, 19 orang atau 25,3 persen menjawab “Sangat Setuju”, maka *mean* dari jawaban responden adalah 3,92 atau rata-rata setuju.

Tabel 4.18

Uji Statistik Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Y3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.3	1.3	1.3
	N	15	20.0	20.0	21.3
	S	43	57.3	57.3	78.7
	SS	16	21.3	21.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjawab “Tidak Setuju” 1 orang atau 1,3 persen yang menjawab “ Tidak Setuju”, 15 orang atau 20,0 persen yang menjawab “ Netral”, 43 orang atau 57,3 persen yang menjawab “Setuju”, 16 orang atau 21,3 persen menjawab “Sangat Setuju”, maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,13 atau rata-rata setuju.

Tabel 4.19

Uji Statistik Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Y4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	26	34.7	34.7	34.7
	S	26	34.7	34.7	69.3
	SS	23	30.7	30.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjawab “Netral” 26 orang atau 34,7 persen yang menjawab “ Netral”, 26 orang atau 34,7 persen yang menjawab “ Setuju”, 23 orang atau 30,7 persen yang menjawab “Sangat Setuju” maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,08 atau rata-rata netral dan setuju.

Tabel 4.20

Uji Statistik Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Y5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.3	1.3	1.3
	N	12	16.0	16.0	17.3
	S	44	58.7	58.7	76.0
	SS	18	24.0	24.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjawab “Tidak Setuju” 1 orang atau

1,3 persen yang menjawab “ Tidak Setuju”, 12 orang atau 16,0 persen yang menjawab “ Netral”, 44 orang atau 58,7 persen yang menjawab “Setuju”, 18 orang atau 24,0 persen menjawab “Sangat Setuju”, maka *mean* dari jawaban responden adalah 4,19 atau rata-rata setuju.

Tabel 4.21

Uji Statistik Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Y6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	11	14.7	14.7	14.7
	S	38	50.7	50.7	65.3
	SS	26	34.7	34.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjawab “Netral” 11 orang atau 14,7 persen yang menjawab “ Netral”, 38 orang atau 50,7 persen yang menjawab “ Setuju”, 26 orang atau 34,7 persen yang menjawab “Sangat Setuju” maka *mean* dari jawaban responden adalah 3,96 atau rata-rata setuju.

4.2.2 Uji Validitas

Pengujian Validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistic yaitu menghitung korelasi antara masing – masing pernyataan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment person correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan item dari *Corrected item – Total Correlation* > dari r table pada

signifikan 0,05 (5 persen). Berikut ini disajikan Validitas darai masing – masing variabel pada tabel berikut:

Tabel 4.22
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Teknologi Informasi	X1.1	0,579	0,2272	Valid
	X1.2	0,844	0,2272	Valid
	X1.3	0,809	0,2272	Valid
	X1.4	0,564	0,2272	Valid
	X1.5	0,435	0,2272	Valid
	X1.6	0,582	0,2272	Valid
Peran Audit Internal	X2.1	0,670	0,2272	Valid
	X2.2	0,864	0,2272	Valid
	X2.3	0,729	0,2272	Valid
	X2.4	0,526	0,2272	Valid
	X2.5	0,370	0,2272	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Y.1	0,679	0,2272	Valid
	Y.2	0,383	0,2272	Valid
	Y.3	0,432	0,2272	Valid
	Y.4	0,330	0,2272	Valid
	Y.5	0,350	0,2272	Valid
	Y.6	0,396	0,2272	Valid

Sumber: Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan taber 4.22 di atas, dapat diketahui Variabel Independen dan Dependen beserta item-item pernyataan yang diuji berdasarkan aplikasi SPSS versi 23 dinyatakan valid. Karena nilai *Corrected Item-Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5 persen).

4.2.3 Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari setiap variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel jika jawaban dari

responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu Konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *Conbach Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4.23
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Teknologi Informasi Individu (X1)	0,756	0,60	Reliabel
Peran Audit Internal (X2)	0,752	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,606	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.23 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini telah reliabel karena secara keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrument kuisisioner dalam penelitian ini.

4.3 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2), Uji Parsial (Uji t) dan (Uji F). Pengujian dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel penelitian. Mengetahui besarnya pengaruh masing –

masing variabel bebas terhadap variabel terikat dan mengetahui apakah seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel terikat.

4.3.1 Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda berguna untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu Pengaruh Teknologi Informasi dan Peran Audit Internal, Variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 4.24
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.677	3.518		7.584	0
	Teknologi Informasi (X1)	-0.263	0.173	-0.242	1.519	0.133
	Peran Audit Internal (X2)	0.215	0.205	0.168	1.051	0.297
a. Dependent Variable: KLKPD (Y)						

Sumber: Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.24 di atas, pada kolom B tercantum nilai konstan dan nilai – nilai koefisien regresi linier berganda untuk masing – masing variabel bebas. Berdasarkan nilai –

nilai itu maka dapat ditentukan model regresi linier berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 26.677 - 2.633 X_1 + 0.215 X_2$$

Keterangan:

Y : KLKPD

X₁ : Teknologi Informasi

X₂ : Peran Audit Internal

Berdasarkan rumus regresi linier berganda di atas dapat dinyatakan nilai koefisiennya sebagai berikut:

- a. Nilai konstan untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar 26,677 artinya apabila variabel bebas bernilai nol (0) maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Badan Pegelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo tetap sebesar 26,677
- b. Nilai Koefisien Regresi sebesar -0,263 menunjukkan bahwa pengaruh Teknologi Informasi (X₁) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), artinya setiap peningkatan variabel Teknologi Informasi sebesar satu persen maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan berkurang sebesar -0,263 satuan.
- c. Nilai koefisien Regresi sebesar 0,215 menunjukkan bahwa Peran Audit Internal (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) artinya setiap peningkatan variabel Peran Audit Internal sebesar satu persen maka Kualitas Laporan Keuangan Pe
- d. merintah Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,215.

4.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.25
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.176 ^a	0.031	0.004	2.824
a. Predictors: (Constant), Peran Audit Internal (X2), Teknologi Informasi(X1)				

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Dari tabel 4.25 koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh Adj. R^2 dari persamaan regresi menghasilkan nilai sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yang terdiri dari Teknologi Informasi dan Peran Audit Internal terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,4 persen sedangkan sisanya sebesar 9,6 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.3.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 dengan ketentuan jika *p-value* < 0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka nilai menunjukkan bahwa variabel-variabel

independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kreteria penilaian menggunakan *dagree of freedom* (df) = n-k dimana n adalah jumlah sampel atau responden dan k adalah kontruksi (variabel). Pada Penelitian ini besarnya df= 75 – 2= 73 dengan $\alpha = 0,05$ sehingga menghasilkan nilai tabel 1,993.

Tabel 4.26
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.677	3.518		7.584	0
	Teknologi Informasi (X1)	-0.263	0.173	-0.242	1.519	0.133
	Peran Audit Internal (X2)	0.215	0.205	0.168	1.051	0.297
a. Dependent Variable: KLKPD (Y)						

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Dari tabel 4.26 di atas, hasil pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individ (parsial) adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. Dari tabe 4.26 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel Teknologi Informasi mempunyai probabilitas signifikan sebesar $0,133 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -1,519 < t_{table} 1,933$. Hal ini

menunjukkan bahwa Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian Hipotesis Pertama (H1) yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan ditolak.

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Peran Audit Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. Pada tabel 4.26 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel Peran Audit Internal mempunyai probabilitas signifikan sebesar $0,297 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,051 < t_{table} 1,933$. Hal ini menunjukkan bahwa Peran Audit Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. Dengan demikian Hipotesis Kedua (H2) yang menyatakan bahwa Peran Audit Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan ditolak.

4.3.4 Hasil Simultan (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji F dengan tarif signifikansi 0,05 atau 5 persen. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria penelitian menggunakan $df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$ dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah kontruksi (variabel). pada penelitian ini besarnya $df_1 = 3-1 = 2$ dan $df_2 = 75-2 = 73$ dengan nilai $\alpha = 0,05$ sehingga menghasilkan F tabel = 3,12. Hasil pengujian uji f dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.27
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.408	2	9.204	1.154	.321 ^b
	Residual	574.178	72	7.975		
	Total	592.587	74			
a. Dependent Variable: KLKPD (Y)						
b. Predictors: (Constant), Peran Audit Internal (X2), Teknologi Informasi(X1)						

Sumber : Data diolah di SPSS Versi.23 tahun 2020

Berdasarkan uji F pada tabel 4.27 di atas yang telah olah memporeleh hasil bahwa nilai $F_{hitung} 1,154 < F_{table} 3,12$ dengan tingkat signifikan sebesar 0,321 persen. Dengan demikian disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini berarti variabel Teknologi Informasi (X1) dan Peran Audit Internal (X2) secara bersama-sama meningkat, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat. Sebaliknya jika variabel Teknologi Informasi (X1) dan Peran Audit Internal (X2) secara bersama-sama menurun, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) juga akan menurun.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal

ini ditunjukkan dengan uji t variabel independen teknologi informasi yang memiliki t_{hitung} sebesar -1,59 lebih kecil dari t_{table} yaitu sebesar 1,933 dan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,133 atau berada di atas taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau dengan kata lain hipotesis H1 ditolak.

4.4.2 Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan uji t variabel independen peran audit internal yang memiliki t_{hitung} sebesar 1,051 lebih kecil dari t_{table} yaitu sebesar 1,933 dan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,297 atau berada di atas taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau dengan kata lain hipotesis H2 ditolak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh Teknologi Informasi dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo maka penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Teknologi Informasi berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo sehingga hipotesis pertama H1 ditolak.
2. Peran Audit Internal berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo sehingga hipotesis pertama H2 ditolak.

5.2 Saran

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan beberapa hal yakni memperluas objek penelitian, dan membahaka variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan faktor eksternal
2. Diharapkan penelitian selanjutnya menjadikan penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengaruh Teknologi Informasi dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo agar

diperoleh hasil atau gambaran yang lebih lengkap sehingga penelitian selajutnya lebih sempurna dari hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*.
- Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Andrianto, E., & Rahmawati, D. 2018. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moerasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(2).
- Diani, D. I. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Emay, Fajar, C. M., & Suparwo, A. 2019. Dampak Audit Internal, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Ecconomica*, 3(1), 1–9.
- Erwin, S. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Ekonomi Dan Keuangan*,

(110), 1–16.

Ferry Irawan. (n.d.). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 41–65.

Ghozali, I. dan H. L. 2014. *Partial Least Square: Konsep Teknik dan Aplikasi Untuk Penelitian Empiris*. Semarang.: Universitas Diponegoro.

Harahap, S. S. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada.

Haza, I. I. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).

Hutapea, P. dan N. T. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta.: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kiswara, D. E., Iswajuni, Handayani, C., & Soetedjo, S. 2018. Meta Analisis: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 54–66.

Kurmoo, M., & Kumagai, H. 2002. A novel class of layered molecular antiferromagnets. *Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology Section A: Molecular Crystals and Liquid Crystals*, 376(25), 555–565.
<https://doi.org/10.1080/10587250210796>

Grani Ramadhani Kusumo. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia

Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. “Pengaruh Faktor-Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Akuntan Publik”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol.5.No.2, Halaman : 63-77.

Lasmara, F., & Rahayu, S. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Perangkat Pendukung Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan*

- Pembangunan Daerah*, 3(4), 231–242.
- Matindas, R. 2002. *Managemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan, dan Usaha* (Edisi II). Jakarta: Grafit.
- Moeheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nazaruddin dan Syahrial. 2017. Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3, 105–120.
- Peraturan Pemrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Permata Sari, Shinta dan Banu Witono (2014). Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pujanira, P., & Taman, A. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Rika Syahadatina & Ismiatika Fitriyana. 2016. Pengarh Sumber Daya Manusia Bidang Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pmerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 1, No 1.
- Sari, A. P. (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 9(1), 33-46.
- Sekaran, U. 2006. *Reserch Method For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. (Buku 2 Edi). Jakarta: Salemba Empat.
- Sitti Johanne Hartiyanti. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Darah Kota Palembang. *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya.

Sutarman. 2012. "Buku Pengantar Teknologi Informasi: Bumi Aksara. Jakarta

Warisno. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Skripsi, Universitas Sumatera Utara.*

<https://hanggaryudha.wordpress.com/2012/11/06/teori-pemeriksaan-akuntansi-auditing/>

